**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A.Latar Belakang Masalah**

Hasil penelitian Rehber, Erkan dan Sule Turhan (2002) di Turki, menyatakan bahwa perubahan pertanian non organik menjadi pertanian organik adalah proses yang kompleks, dengan resiko tinggi dan permasalahan yang serius, baik dari segi teknik maupun ekonomi. McEachern, Morven G, dalam penelitiannya di Amerika Serikat (2004), menyimpulkan bahwa proses kognitif yang utama adalah sikap dari produsen dan konsumen yang merupakan masukan dari tingkah laku dan emosi sebagai potensi dasar sehingga membuat kesulitan untuk dipelajari dan ini juga didapatkan dari pengaruh kepentingan yang lain serta adanya variabel bebas (persepsi dan tujuan).Selanjutnya Pellegrini, Giuseppe (2009) di Itali menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam membeli makanan dari produk biologi atau alami adalah motivasi kesadaran seseorang akan kepuasan terhadap produk tersebut. Jum, Chai *et al* (2010) di China, hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pertanian organik adalah upaya strategis yang potensial untuk mengembangkan pertanian yang lebih berkelanjutan. Sedangkan Olabiyi *et al* (2010) di Inggris, menyimpulkan bahwa sistem pertanian organik pada tanaman Leguminosae dapat membangun kesuburan tanah. Selanjutnya Mukhtar *et al* (2010) di Nigeria, menyatakan bahwa efek penggunaan pupuk organik pada tanaman ubi jalar menunjukkan perbedaan yang tidak signifikan dengan penggunaan pupuk non organik.

Untuk di Indonesia, hasil penelitian Takagi (2010), menyimpulkan bahwa faktor-faktor pembatas dari pertanian organik adalah terbatasnya interaksi petani dengan agen-agen pengembang, antara petani dengan pelanggan, terbatasnya standar pelaksanaan dengan produksi tanaman organik, tingginya biaya untuk mendapatkan sertifikasi bagi tanaman organik dan kondisi iklim, khususnya musim kemarau yang panjang dan curah hujan yang tinggi selama musim hujan yang membuat sulitnya pengendalian terhadap hama dan penyakit. Selanjutnya Samun, Rukmana dan Syam (2011) menyimpulkan bahwa sebagian besar petani tidak mau berpartisipasi dalam program Pemerintah, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi dalam pertanian organik. Sedangkan Widiarta, Aero *dkk* (2011), menyimpulkan bahwa praktek pertanian organik terbukti berpengaruh positif terhadap keberlanjutan ekonomi petani.

Dari hasil-hasil penelitian di atas, terlihat bahwa kesemuanya berfokus pada bagaimana (epistemologi) praktik pertanian organik dan manfaat (aksiologi) dari pertanian organik itu sendiri. Topik yang akan dikaji ini lebih berfokus pada bagaimana dinamika praktik pertanian organik di Desa Bonto Lebang Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar.

Permasalahan dalam dinamika pertanian organik di Desa Bonto Lebang Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, disebabkan oleh adanya peningkatan yang tidak signifikan dari tahun ke tahun luas lahan dan petani yang mengaplikasikan pertanian organik tidak bertambah jumlahnya dibandingkan dengan aplikasi pertanian non organik di desa tersebut (dapat dilihat pada Tabel. 3).

Pemilihan Desa Bonto Lebang Kecamatan Galesong Utara, dilakukan secara sengaja *(Purposive*) dikarenakan lokasi studi yaitu Desa Bonto Lebang adalah salah satu desa yang mempraktikkan pertanian organik pertama kali di Sulawesi Selatan, melalui bantuan dari Negara Jepang lewat pelatihan yang diadakan JICA (Japan International Corporation Agency).

Menurut data Aliansi Organik Indonesia (AOI) tahun 2013, perkembangan luas area pertanian organik di Indonesia, dari tahun ke tahun tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pada tahun 2007, luas lahan pertanian organik mencapai 40.970 hektar. Sedangkaan tahun 2008, mencapai 208.530 hektar. Jadi dari tahun 2007-2008, mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Namun tahun 2009 hanya mencapai 214.985 hektar, hal ini berarti dari tahun 2008 sampai tahun 2009 hanya mengalami peningkatan sebanyak 3 %. Kemudian pada tahun 2010, luas lahan pertanian organik adalah 238.872 hektar. Jadi dari tahun 2009-2010, peningkatannya mencapai 10 %. Selanjutnya pada tahun 2011, menurun menjadi 225.063 hektar. Terjadi penurunan 5,77 %. Begitu juga tahun 2012, luas lahan pertanian organik hanya mencapai 235.078,16 hektar. Bahkan pada tahun 2013 hanya tersisa 231.687,11 hektar. Jadi dari tahun 2012-2013 luas lahan pertanian organik terus mengalami penyusutan dan tampaknya akan terus mengalami pengurangan. Terjadinya penurunan ini, disinyalir sebagai akibat dari adanya program sertifikasi bagi tanaman organik. Petani sebagai aktor dari penghasil tanaman organik dalam hal ini, tidak berkenan atas program sertifikasi tersebut.

Adapun luas lahan pertanian organik di Sulawesi Selatan belum didata secara teliti oleh pihak yang terkait. Data yang ada adalah luas lahan pertanian secara umum. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Luas Lahan Pertanian di Sulawesi Selatan (Tahun 2009 – 2013)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Luas lahan pertanian | Tahun 2009(ha) | Tahun 2010(ha) | Tahun 2011(ha) | Tahun 2012(ha) | Tahun 2013(ha) |
| Lahan Sawah | 581.610 | 576.970 | 582.444 | 592.194 | 603.151 |
| Lahan Bukan Sawah | 1.877.470 | 1.904.895 | 1.852.524 | 1.844.249 | 2.575.702 |

Sumber : Hasil Pengolahan Data Lahan (2014).

Terlihat pada Tabel 1. Luas lahan pertanian di Sulawesi Selatan dari tahun ke tahun bersifat fluktuatif. Untuk lahan sawah tahun 2009 – 2010 mengalami penurunan sekitar 5 ha atau 0,86 %, namun dari tahun 2010 -2013, mengalami kenaikan sekitar 27 ha atau 4,7 %.

 Gambaran luas panen dan produktifitas lahan untuk Kabupaten Takalar dapat dilihat pada Tabel 2. Untuk produktifitas lahan, dari tahun 2009 - 2010 mengalami penurunan 1 kuintal/ha atau sekitar 1 %. Sedangkan tahun 2010 – 2013 terus mengalami peningkatan 1,207 ha atau sekitar 3,6 %. Namun untuk luas panen, dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan secara tidak signifikan.

Tabel 2. Luas Panen dan Produktivitas Lahan di Kabupaten Takalar

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahun | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Luas Panen (ha) | 862.017 | 886.354 | 889.232 | 981.394 | 983.107 |
| Produktivitas (kuintal/ha) | 50,16 | 49,44 | 50,74 | 50,98 | 51,22 |
| Produksi (ton) | 4.324.178 | 4.382.443 | 4.511.705 | 5.003.011 | 5.035.830 |

Sumber: Data Setelah Diolah Dari Kabupaten Takalar (2014).

Sedangkan data tentang perkembangan perbandingan jumlah petani organik dan non organik dengan luas lahannya di Kecamatan Bonto Lebang Kabupaten Takalar (lokasi penelitian) lima tahun terakhir, dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Perbandingan Jumlah Petani Organik dan Non Organik dan Luas Lahan dari Tahun 2009-2013 di Kecamatan Bonto Lebang Kabupaten Takalar

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tahun | Pertanian Organik | Pertanian Non Organik |
| **LuasLahan (ha)** | **JumlahPetani (org)** | **LuasLahan(ha)** | **JumlahPetani(org)** |
| 2009 | 11,25 | 35 | 228,75 | 777 |
| 2010 | 11,32 | 42 | 228,68 | 795 |
| 2011 | 12,25 | 48 | 227,75 | 805 |
| 2012 | 12,55 | 53 | 227,45 | 812 |
| 2013 | 12,65 | 55 | 227,35 | 833 |

Sumber: Data setelah Diolah dari Kabupaten Takalar (2014).

Dari Tabel 3, dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun, jumlah petani organik mengalami peningkatan yang tidak signifikan. Peningkatan yang tertinggi dari tahun 2009 sampai 2010, yaitu mencapai 7 orang. Selanjutnya setelah tahun 2010,jumlah petani organik mengalami kenaikan yang kecil, bila dibandingkan dengan petani non organik. Sedangkan jumlah petani non organik menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan yaitu 56 orang. Dari tahun 2012 hingga tahun 2013 mencapai peningkatan yang cukup tinggi dalam lima tahun terakhir yaitu 21 orang. Dilihat dari segi luas lahan, luas lahan pertanian organik terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun tidak signifikan yaitu sekitar 1,40 ha. Sedangkan luas lahan pertanian non organik dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan yaitu sekitar 1,40 ha.

Penerapan pertanian organik adalah penerapan metode baru dalam bidang pertanian, yang dinamakan metode SRI (*System of Rice Intensification*). SRI adalah penanaman secara organik tanpa pupuk dan pestisida kimia sintetis, dan prinsipnya adalah memperbaiki perakaran tanaman dengan cara mengatur pengairan, menerapkan tanam tunggal, waktu tanam dini dan memperbaiki kualitas tanah, sehingga mengurangi penggunaan air dan mengurangi kebutuhan benih. Beberapa kelompok tani dan responden di lokasi kajian menunjukkan rasa antusias yang cukup besar untuk menerapkan sistem pertanaman SRI, sehingga secara bertahap jumlah dan luasan (petani dan pertanaman)terus berkembang. Namun demikian, kekhawatiran terhadap resiko yang akan dihadapi tetap menjadi faktor yang cukup penting, terutama bagaimana melakukan penerapan komponen SRI yang dianjurkan. Selain itu dengan sistem ini membutuhkan materi organik yang banyak. Akibatnya, perkembangan luasan usaha tani yang dilakukan masing-masing petani, relatif masih terbatas pada sebagian lahan yang dimiliki serta melakukan adopsi komponen SRI secara bertahap. Nampaknya, masih diperlukan penyesuaian-penyesuaian lain yang secara tidak langsung merupakan proses pembelajaran petani dalam mengadopsi teknologi SRI. Berkaitan dengan resiko tersebut, di lokasi kajian juga masih ada para petani yang belum atau tidak tertarik dengan pola SRI ini.

 Adanya kegiatan kelompok yang terencana dan rutin sebagai upaya untuk bertukar pengalaman serta menambah ilmu pengetahuan, telah mendorong SRI untuk dipraktikkan dalam usaha tani. Kegiatan magang dan praktik lapang yang diselenggarakan secara swadaya oleh lembaga informal berkaitan dengan penerapan komponen SRI, memberikan umpan balik bagi kepentingan petani dalam pemenuhan kebutuhan pengetahuan tentang SRI, sekaligus sebagai pembelajaran langsung di lapangan. Metode pembelajaran seperti ini relatif mencapai sasaran dan lebih aplikatif dalam penerapan inovasi baru bagi para petani. Secara umum persepsi petani menunjukkan bahwa penggunaan pupuk organik telah membantu mengurangi biaya bagi petani untuk pembelian pupuk non organik, terutama dalam kondisi kenaikan harga pupuk serta beberapa kasus kelangkaan pasokan. Pada situasi ini, wacana pertanian organik telah menjelma menjadi praktik sosial.

Persepsi petani terhadap kelembagaan pendukung, sampai saat ini dirasakan masih sangat terbatas. Kelembagaan yang selama ini sangat terkait dengan pembinaan petani dilakukan oleh Yayasan Field Indonesia melalui kelompok-kelompok studi petani yang di masing-masing lokasi kegiatan SRI. Adanya kegiatan secara intensif oleh lembaga-lembaga tersebut menjadi solusi yang cukup berharga bagi pengembangan dinamika kelompok, pengetahuan dan pengalaman petani pada saat terjadi stagnasi proses penyuluhan lapangan seperti saat ini, termasuk keterbatasan peran serta lembaga-lembaga formal terkait.

 Pada komunitas petani SRI sendiri, pada awalnya sebagian besar petani merasa ragu, bahkan memperkirakan bahwa pola SRI akan menyebabkan penurunan produktifitas. Petani yang merupakan *early adopter* terhadap pola SRI ini juga mendapat respon negatif dari masyarakat sekitarnya. Keraguan tersebut tidak hanya terjadi pada masyarakat, tetapi juga pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam mempertahankan produktivitas. Hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi komunitas SRI untuk menerapkannya secara partisipatif, melalui berbagai kreatifitas dan pengalaman masing-masing.

Prestasi pembangunan Indonesia pada dekade pertama kekuasaan Orde Baru, oleh banyak pihak dianggap sebagai prestasi yang luar biasa (*miracle*). Orde Baru berhasil memanfaatkan *booming* minyak pada tahun 1970an menjadi akumulasi kapital untuk mendanai program pembangunan Indonesia saat itu. Sadar akan potensi Indonesia sebagai negara agraris, maka pemerintahan rezim Soeharto berupaya menggenjot sektor pertanian sebagai basis perekonomian Indonesia. Kondisi ini semakin mulus karena dipermudah oleh program Revolusi Hijau atau modernisasi sektor pertanian yang sedang dikampanyekan oleh negara barat, terutama Amerika Serikat. Dampaknya memang luar biasa, Indonesia berhasil mencapai surplus beras (swasembada), bahkan bisa mengekspor beras ke luar negeri. Revolusi Hijau telah berhasil mengantarkan Indonesia meraih penghargaan dari *Food and Agricultural Organization* (FAO), karena keberhasilan berswasembada beras pada tahun 1984.

Keberhasilan ini merupakan prestasi yang luar biasa pada saat itu, mengingat Indonesia baru saja mengalami krisis ekonomi pasca lengsernya Soekarno. Namun dibalik itu, terdapat suatu ketergantungan yang sangat akut kepada negara-negara Barat melalui bantuan (*grant),* penggunaan bibit unggul, pestisida dan pupuk kimia buatan lembaga riset internasional dan *Multi National Corporation* (MNCs).

Kebijakan pembangunan pertanian yang dijalankan oleh Orde Baru pada masa itu sangat bertumpu pada modernisasi pertanian. Modernisasi pertanian di sini tidak hanya modernisasi sarana dan infrastruktur pertanian, tetapi juga menyentuh aspek yang sangat vital dalam pertanian itu sendiri yaitu bibit, pupuk dan pestisida. Akibatnya, jadilah Indonesia santapan empuk *International of Rice Research Institute* ( IRRI). Fahmid (2004) menganalisis bahwa kebijakan dan politik pangan di Indonesia di bawah rezim orde baru yang terlalu percaya pada Revolusi Hijau dan mekanisasi pertanian, merupakan propaganda ekonomi politik Amerika Serikat. Padahal Revolusi Hijau hanya digunakan sebagai alat untuk memperkuat ketergantungan negara-negara berkembang terhadap negara-negara maju melalui penyediaan bibit unggul, pestisida dan pupuk non organik. Pemerintahan Orde Baru berhasil menggunakan Revolusi Hijau sebagai agenda untuk menggeser arah pembangunan dari pembangunan sektor pertanian menuju sektor industri. Di atas semua itu, melimpahnya produksi beras karena program Revolusi Hijau, tidak lain merupakan sarana untuk memperkokoh kekuasaan Soeharto dengan menyediakan pangan murah bagi masyarakat miskin.

Sistem pertanian di Indonesia dalam konteks historisnya sangat dinamis dan heterogen. Jauh sebelum Indonesia merdeka, masyarakat pribumi sudah mengembangkan pertanian subsisten dengan metode konvensional. Ketika sistem pertanian modern diperkenalkan oleh rezim orde baru, pola pertanian masyarakat mengalami banyak perubahan. Di awal 1970an ketika Revolusi Hijau mulai diterapkan, terjadi pergeseran sistem pertanian rakyat.

Menurut Fakih (2010), perubahan tersebut bukan hanya pergeseran, akan tetapi lebih kepada peminggiran (marjinalisasi) dari struktur dan sistem sosialnya. Proses marjinalisasi ini berlangsung secara sistematis dengan cara memberangus bibit atau benih lokal yang telah lama dibudidayakan oleh masyarakat dengan cara menggantinya dengan benih unggul buatan perusahaan multinasional (MNCs), mengintrodusir dan mensubsidi secara besar-besaran pupuk kimia dan pestisida, dan menggantikan penggunaan tenaga manusia dengan penggunaan mesin.

Keberhasilan pembangunan pertanian di Indonesia pada masa orde baru harus dibayar mahal karena dalam jangka panjang menimbulkan efek negatif diantaranya; menyebabkan Indonesia memiliki ketergantungan yang tinggi pada beras, rusaknya kesuburan tanah karena pemakaian pupuk kimia dan pestisida secara massif, hilangnya bibit lokal karena petani dipaksa memakai bibit unggul buatan MNCs, tergusurnya kaum perempuan akibat mekanisasi pertanian, hilangnya komoditas lokal seperti sagu, ketela dan jagung karena perubahan budaya makan masyarakat.

Masyarakat umum menyatakan bahwa, masyarakat petani di pedesaan, dipandang sebagai fenomena (yang jelek) dan memperlakukannya sebagai agregat-agregat tanpa bentuk, tanpa struktur, masyarakat tradisional dan mencap mereka sebagai manusia-manusia yang ‘terikat tradisi’ (kebalikan dari modern). Masyarakat luar desa, pertama-tama memandang kaum petani di pedesaan sebagai satu sumber tenaga kerja dan barang yang dapat menambah kekuasaannya (*fund of power*). Padahal kenyataannya, petani juga merupakan pelaku ekonomi (*economic agent*) dan kepala rumah tangga, dimana tanahnya merupakan ‘satu unit ekonomi dan rumah tangga’ (Wolf, 1985 *dalam* Salman, 1995).

Sentralitas dan sifat top down mekanisme pembangunan yang terwujud dalam aplikasi teknologi berisi input eksternal yang menuntut modal tinggi untuk memperbaiki proses produksi dan memperbaiki produktifitas, hanya mampu diadopsi dan dinikmati oleh petani berlahan luas (lapisan menengah dan atas). Pengaplikasian paket teknologi tersebut berdampak luas terutama menjadi longgarnya ikatan nilai dan norma lokal yang berorientasi sosial dan bersifat komunal sebagai akibat lebih mengedepankan efisiensi ekonomi. Sementara pengetahuan lokal (*indigenous knowledge*) yang ada dan berkembang dimasyarakat, penerapan dan pelestariannya semakin terhambat.

Di sisi lain, proses pelestarian yang diusahakan saat ini, lebih dikenal sebagai pertanian berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan (*Sustainable Agriculture*) merupakan implementasi dari konsep pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development)* pada sektor pertanian. Konsep pembangunan berkelanjutan dimulai pada akhir tahun 1980an sebagai respon terhadap strategi pembangunan sebelumnya, yang berfokus pada tujuan pertumbuhan ekonomi tinggi yang terbukti telah menimbulkan degradasi kapasitas produksi maupun kualitas lingkungan hidup. Pertanian berkelanjutan merupakan pengelolaan sumber daya alam dengan teknologi dan kelembagaan untuk menjamin pemenuhan dan pemuasan kebutuhan manusia secara berkelanjutan.

 Bolan and Foster *dalam* Carolan (2006), menyatakan bahwa aspek sosial budaya merupakan hal penting dalam perencanaan pertanian berkelanjutan, karena perencanaan merupakan aktifitas moral. Kelembagaan petani, seperti kelompok tani, dinilai relatif paling penting dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan. Kelompok tani merupakan wadah bagi para petani untuk berkumpul, saling berbagi pengetahuan, transfer teknologi dan informasi, merubah pola pikir, bekerjasama untuk menyelesaikan permasalahan pertanian yang dihadapi, baik secara pribadi maupun kolektif. Secara umum kegiatan-kegiatan pertanian bersifat kolektif, memerlukan banyak tenaga, serta tidak dapat dilakukan sendiri. Mulai dari pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman, panen dan pasca panen. Penerapan model pertanian berkelanjutan, seperti pengembangan pertanian organik memerlukan kebersamaan antara petani pada suatu kawasan, kegiatan memutus siklus hama tanaman juga memerlukan kerjasama semua petani di suatu wilayah.

Masyarakat selanjutnya jadi semakin tergantung pada nilai dan kekuatan luar desa seperti pasar dan industri perkotaan yang bersifat ekonomi dan individualis; dimana ukuran yang digunakan tidak lagi menyangkut kelestarian dan kebersamaan, melainkan eksploitasi dan sukses finansial semata. Artinya, masyarakat desa sangat rapuh terhadap faktor yang berada diluar pengendaliannya. Implikasi lain adalah memudarnya sistim ekonomi moral yang sebenarnya; dimana etika subsistensi yang berakar dalam kebiasaan ekonomi dan pertukaran sosial tidak dapat difungsikan dalam era pembangunan modern (Scott, 1981 *dalam* Salman 1995).

**B.Rumusan Masalah**

Penelitian mengenai dinamika perkembangan pertanian organik telah banyak dilakukan, namun penelitian ini tetap perlu dan menarik untuk dijalankan. Alasan pertama, hingga saat ini isu mengenai pangan tetap menjadi prioritas semua bangsa, terutama di Indonesia. Terkait dengan itu, penelitian tentang pertanian sebagai salah satu basis produksi pangan tentu saja tetap penting dilaksanakan. Alasan kedua, tidak banyak penelitian yang mencermati bagaimana pengetahuan tentang pertanian organik dan non organik yang dimiliki petani sebagai aktor yang berperan langsung dalam aplikasi pertanian organik dan berbagai pihak yang terkait. Selain itu belum banyak penelitian yang mencermati fase-fase aplikasi pertanian organik, sebagai “pembelajaran” bagi para petani, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari program aplikasi pertanian organik.dan berbagai pihak yang terkait, demi terjadinya kenaikan yang signifikan dari program aplikasi pertanian organik.

Dinamika aplikasi pertanian organik yang notabene lebih berpihak kepada kesehatan yang selanjutnya akan berpihak kepada segi ekonomi (keuntungan). Penelitian ini menjelaskan bagaimana dinamika sistem pertanian organik, yang tanpa disadari sudah merupakan *saatnya* untuk diaplikasikan.

Untuk menjawab masalah pokok tersebut, diuraikan 2 pertanyaan penelitian secara kronologis sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika pengetahuan dari aplikasi pertanian organik yang dimiliki petani dan berbagai pihak yang terkait dalam praktik pertanian organik di Desa Bonto Lebang kabupaten Takalar tersebut?
2. Fase-fase apa saja yang dilalui dalam dinamika aplikasi pertanian organik di Desa Bonto Lebang Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar?

**C.Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis dinamika pengetahuan dari aplikasi pertanian organik yang dimiliki petani dan berbagai pihak yang terkait dalam praktik pertanian organik di Desa Bonto Lebang Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar.
2. Untuk menganalisis fase-fase yang dilalui dalam dinamika aplikasi pertanian organik di Desa Bonto Lebang Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar.

**D.Manfaat Penelitian**

 Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan nilai yang berguna bagi permasalahan umat manusia, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan, maupun bagi kehidupan masyarakat pada umumnya.

1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan:

Penelitian ini secara umum diharapkan akan memberikan manfaat bagi pengembangan bidang ilmu pertanian dan bidang ilmu sosiologi serta secara khusus diharapkan akan memberi arah baru bagi pengembangan sub bidang sosiologi pertanian dan teori inovasi dari Rogers, terutama yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah dan struktur lainnya. Di lain pihak, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna untuk mengenal lebih jauh dinamika sosial petani dalam mempertahankan dimensi kemandiriannya dari struktur yang mendominasi.

2. Bagi masyarakat umum:

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi yang berguna untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran umum, yang dibutuhkan baik bagi individu maupun bagi masyarakat, mengenai berbagai fenomena sosiologis yang terjadi di arena pertanian, sehingga dapat menghindari hal-hal yang akan menjadi konflik antara Pemerintah, organisasi sosial yang terkait dan petani sebagai aktor langsung dalam menghasilkan produk pertanian.